

IRONI KEMISKINAN NELAYAN DI DESTINASI WISATA BAHARI

Yusuf Hermawan¹

Magister Kajian Pariwisata UGM¹

yusupherman88@gmail.com

Abstract: Indonesia is the largest archipelagic country and has the second longest coastline in the world. The benefits of Indonesia's rich marine resources have not yet been fully felt by coastal communities. This is shown by the existence of poverty data that still surrounds coastal communities. This research aims to determine the causes of poverty and overcome poverty through local community participation in the marine tourism industry. This research also aims to provide recommendations to the government, marine tourism actors and local communities to reduce poverty rates in marine tourism areas. This research uses a qualitative descriptive method with data collection in the form of interviews, observation and documentation. The results of this research show that the root cause of poverty in fishing communities in marine tourism destinations is the lack of support from local governments and entrepreneurs. Apart from that, fishing communities tend to only rely on one source of livelihood. Poverty reduction can be done by increasing the support of local governments and entrepreneurs as well as providing side job options to increase the income of fishing communities.

Keywords: Marine Tourism; Poverty; Coastal Communities

Article Information: Submission: 30 Januari 2024, Accepted: 16 Mei 2024, Published: 30 Juni 2024

DOI: 10.53691/jpi.v20i1.408



Copyright © 2024 by the author(s). This article is published by Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta, Indonesia under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. Anyone may reproduce, distribute, translate, and create derivative works of this article (for both commercial

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan beragam sumber daya bahari namun tidak seluruh masyarakat pesisir mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi secara signifikan akibat dari perkembangan industri pariwisata bahari. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat pesisir masih hidup dalam kondisi kemiskinan yang mengkhawatirkan (Juliantono dan Munandar, 2016). Kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan telah menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan tergolong nelayan buruh atau nelayan-nelayan kecil (Anwar dan Wahyuni, 2019).

Kemiskinan agregat berdasarkan status pekerjaan menunjukkan bahwa sektor perikanan mendapatkan skor tertinggi keempat setelah pertanian padi palawija, hortikultura, dan perkebunan (Susenas dalam Anna, 2019). Sebanyak 11,34% masyarakat yang bekerja di sektor perikanan tergolong dalam kategori miskin (Susenas dalam Anna, 2019). Hal tersebut menyebabkan penurunan signifikan pada jumlah nelayan dari tahun 2010 sebanyak 2,16 juta orang menjadi 1,83 juta orang pada tahun 2019 (Walhi, 2022). Pada akhir tahun 2022, jumlah nelayan kembali mengalami penurunan menjadi 1,27 juta orang (Kemendagri dalam Data Indonesia, 2023).

Perangkap kemiskinan menjadi salah satu penyebab penurunan jumlah nelayan. Perangkap kemiskinan disebabkan oleh lima faktor antara lain kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik,

keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan (Robert Chambers, 1983). Kerentanan nelayan yang ada di Indonesia adalah sebesar 61,68% orang (Susenas dalam Anna, 2019). Kerentanan nelayan tersebut dipengaruhi oleh aspek kebijakan, kelembagaan, dan proses-proses intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta swasta (Wahyono, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi penanggulangan kemiskinan melalui partisipasi masyarakat nelayan dalam industri pariwisata bahari. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah, pelaku wisata bahari baik penyedia jasa pariwisata maupun pengusaha akomodasi, serta masyarakat nelayan dalam menekan angka kemiskinan di kawasan pesisir.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan lekat pada kehidupan masyarakat nelayan dan menjadi keadaan faktual di seluruh wilayah Indonesia (Humaedi, 2012). Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin (Imron, 2001; Kusnadi, 2002). Lebih lanjut, dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan dan

nelayan tradisional) tergolong sebagai lapisan sosial yang paling miskin (Retno dan Santiasih, 1993).

Persoalan terkait dengan keterbatasan modal, pengetahuan, keahlian, penggunaan teknologi alat tangkap dan *overfishing* menjadi beberapa penyebab kemiskinan atau rendahnya peningkatan kesejahteraan di masyarakat pesisir (Imron 2006). Oleh sebab itu, masalah yang belum terselesaikan pada masyarakat pesisir adalah modal yang lemah, permainan harga jual ikan, terbatasnya pengetahuan, terbatasnya penggunaan teknologi, dan terbatasnya daya serap produk pengelolaan ikan (Imron, 2006).

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. (BPS, 2023). Kemiskinan disebabkan oleh minimnya akses terhadap modal, informasi, dan teknologi yang dikuasai oleh sekelompok orang (Tahawila, 2019). Lebih lanjut, selain tantangan alam (musim tidak menentu), masyarakat pesisir juga memiliki pola homogen yang bergantung hanya pada satu sumber penghasilan (Anwar dan Wahyuni, 2019). Pada aspek aset penghidupan masyarakat pesisir dapat dibagi menjadi enam modal antara lain modal finansial, modal manusia, modal sumber daya alam, modal budaya, dan modal sosial (Jamieson dkk, 2004).

Pariwisata Bahari

Pariwisata bahari adalah kegiatan olahraga di air, danau, bengawan, teluk atau laut (Pendit, 2009). Contoh dari wisata bahari adalah memancing, berlayar, menyelam, berselancar, mendayung, selancar, dan pemotretan bawah laut. (Pendit, 2009). Wisata bahari adalah kegiatan yang memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata dan aktivitas wisata yang dilakukan di atas maupun di bawah permukaan di wilayah laut yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya (Sarwono dalam Gautama, 2011). Lebih lanjut, pariwisata bahari adalah bentuk aktivitas yang memanfaatkan potensi lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama yang didasarkan pada pemandangan, keunikan alam, dan karakteristik masyarakat nelayan (Djou, 2013).

Pariwisata bahari dibagi menjadi empat kategori antara lain wisata bahari berbasis alam, wisata bahari berbasis budaya, wisata bahari berbasis aktivitas, dan wisata bahari berbasis *event* (Masjhoer, 2019). Hal tersebut dapat berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat nelayan jika dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat nelayan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari penelusuran dokumen,

observasi, dan wawancara. Analisis data kualitatif menggunakan teori Colaizzi (1978) dengan menemukan makna wawancara dan mengelompokkan ke dalam tema yang telah ditentukan. Data yang disajikan berupa uraian naratif sehingga menghasilkan data yang ringkas dan mudah dipahami serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kemiskinan Nelayan di Destinasi Wisata Bahari

Proses pembangunan dan pengembangan pariwisata bahari belum memperhatikan aspek kesejahteraan nelayan. Hal tersebut terjadi karena orientasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengejar angka kunjungan, *spend money*, dan *length of stay* wisatawan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum memprioritaskan aspek kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Hal tersebut dibuktikan dengan perubahan kepemimpinan yang dibarengi dengan perubahan kebijakan sehingga kebijakan yang lama belum berjalan secara optimal.

“Kan biasanya ganti pejabat itu ganti kebijakan lagi”

Selain itu, kemiskinan nelayan disebabkan karena tidak terserapnya masyarakat pesisir. Minimnya pelibatan nelayan pada industri pariwisata bahari dikarenakan keterampilan dan kemampuan dari masyarakat

nelayan yang belum sesuai standar. Keterampilan dan kemampuan yang dimaksud adalah seperti menjadi pemandu wisata selam dan *snorkeling*, manajerial *dive center*, *hospitality*, kemampuan bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Mayoritas nelayan belum memiliki akses untuk menggapai sertifikasi atau lisensi dalam menunjang keterlibatannya di industri pariwisata bahari. Pada konteks tersebut, pengusaha bidang wisata bahari dan investor memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan pelatihan kepada nelayan. Tujuan dari pelatihan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Pengupayaan terhadap pelatihan sumber daya manusia telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah namun belum disikapi secara bijak oleh masyarakat nelayan. Hal tersebut tercermin dari ketergantungan masyarakat nelayan pada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

“Kita (Pemerintah Daerah) ngisi-ngisi terus tapi masih begitu, itu setelah mungkin dikasih pelatihan, minta lagi apanya, mungkin alatnya, selalu mau di dampingi terus sampai ke situ-situnya.”

Kendala Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat adalah pola berpikir nelayan yang selalu mengharap uang. Selain itu, masyarakat nelayan juga belum memiliki inovasi dan ide mengenai usaha yang telah dijalankan. Munculnya inovasi dan ide tersebut tidak muncul secara spontan. Terdapat variabel pendukung seperti tingkat pendidikan, tingkat kesehatan,

tingkat keterampilan, tingkat keterlibatan sosial, dan tingkat kesejahteraan.

"Meskipun ada juga yang macet, habis terima uangnya, mereka bagi sudah, habis, nanti tahun depan mereka mengharap lagi, bikin proposal lagi."

Destinasi wisata bahari dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan. Salah satu fasilitas yang ditawarkan kepada wisatawan adalah akomodasi. Akomodasi yang kerap muncul di kawasan destinasi wisata bahari adalah *resort* dan rata-rata dimiliki oleh warga asing. Namun, PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diberikan oleh investor *resort* di kawasan destinasi wisata bahari belum berdampak pada kesejahteraan nelayan. Masyarakat nelayan merupakan lapisan masyarakat yang bersinggungan langsung terhadap destinasi wisata bahari namun belum merasakan dampak ekonomi yang positif dari adanya pariwisata.

"Peluang banget mereka (investor asing) ada disini, kenapa kita hanya jadi penonton, padahal sebenarnya bisa banget kita, dimana lemahnya kita, nah itu kembali lagi ke regulasi. Fokus untuk hal tersebut untuk menjaga misalkan kok ada *resort* masih ada masyarakat miskin, artinya tidak ada imbasnya ke mereka (masyarakat nelayan), itu kembali lagi ke kita (Pemerintah Daerah), kok bisa kita ceroboh ya."

Dilema pembangunan dan pengembangan wisata bahari merupakan momok yang menyeramkan bagi nelayan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena adanya industri pariwisata tidak dibarengi dengan distribusi keuntungan yang rata. Hal tersebut yang menyebabkan ketimpangan ekonomi antara pengusaha asing dan masyarakat nelayan. Selain itu, kecemburuan dan ketidakadilan juga didapatkan oleh nelayan. Hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan dapat terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan struktur ekonomi. Kemiskinan memiliki korelasi yang erat dengan pendapatan nasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah dan investor asing harus berdiskusi untuk menentukan kebijakan yang pro terhadap nelayan.



Gambar 1. Destinasi Wisata Bahari

Sumber: Dokumentasi Peneliti
(2022)

Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan dengan penyebab kemiskinan masyarakat pesisir. Masalah tersebut antara lain

pendapatan yang rendah, pendidikan dan keterampilan yang minim, minimnya penyerapan tenaga kerja lokal, dan berakhir pada terisolasinya masyarakat pesisir pada akses mengelola kawasan bahari karena adanya industri wisata bahari. Masalah diatas dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Lingkaran Kemiskinan Nelayan dalam Industri Wisata Bahari

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Sektor unggulan yang terdapat di kawasan pesisir antara lain perikanan, kelautan, dan pariwisata. Namun, tiga sektor unggulan tersebut didominasi oleh kapital. Kapital yang dimaksud adalah pucuk pimpinan organisasi atau komunitas. Kapital yang di kawasan bahari berupa tengkulak, rentenir, dan juragan/pemilik kapal. Kapital di kawasan bahari

tersebut dapat memperdalam masyarakat pesisir jatuh kedalam perangkap kemiskinan.

Pandemi menjadi alasan selanjutnya yang mendorong tingkat kemiskinan. Daya beli pasar yang rendah menyebabkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat nelayan tidak terserap. Oleh sebab itu, meskipun dengan adanya wisata bahari, masyarakat nelayan diharapkan tidak menggantungkan keseluruhan ekonomi pada pariwisata. Hal tersebut dikarenakan pariwisata adalah sektor usaha yang rentan terhadap ancaman (bencana alam, informasi bohong (*hoax*), dan terorisme).

Penanggulangan Kemiskinan Nelayan di Destinasi Wisata Bahari

Kemiskinan merupakan kondisi yang merendahkan martabat manusia dan berpotensi menimbulkan masalah sosial (menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat). Oleh sebab itu, ketimpangan dalam masyarakat harus segera dicarikan solusi yang berpihak pada masyarakat miskin. Bantuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi bantuan sosial-ekonomi, perbaikan akses dan kesempatan untuk menerima layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja (Kementerian Bappenas, 2020). Penanggulangan kemiskinan nelayan di destinasi wisata bahari dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1. Keberpihakan Pemerintah dan investor terhadap masyarakat nelayan yang termajinakan
2. Peningkatan *mindset* masyarakat nelayan sehingga dapat menumbuhkan sikap optimisme
3. Peningkatan kualitas atmosfer dalam industri wisata bahari
4. Menjadikan industri pariwisata bahari sebagai pekerjaan sampingan

Keberpihakan kepada masyarakat nelayan harus menjadi prioritas sehingga dapat memunculkan kesempatan dan potensi yang besar untuk membantu keluar dari kemiskinan. Keberpihakan Pemerintah Daerah bukan dalam konteks bantuan pendanaan atau BLT (Bantuan Langsung Tunai). BLT yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Daerah akan ditangkap oleh masyarakat nelayan sebagai pemasukan yang bersifat berkelanjutan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat nelayan akan terus mengharapkan bantuan dan tidak dapat keluar dari pola pikir pengemis. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan stimulus berupa pemahaman terhadap pertumbuhan inovasi dan ide usaha sampingan selain menjadi nelayan. Lebih lanjut, usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat nelayan.

Selain itu, investor yang berada dalam industri wisata bahari juga diharapkan dapat memiliki komitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal. Tenaga kerja lokal dengan pendidikan dan keterampilan yang minimal harus

diberikan pelatihan yang menunjang aktivitas wisata bahari. Pelatihan yang diberikan dapat berupa peningkatan kemampuan bahasa Inggris, pelatihan kepemanduan wisata bahari (*snorkeling*, selam, dan selancar), pelatihan manajerial, pelatihan *food and beverage*, pelatihan *housekeeping*, dan pelatihan *hospitality*. Investasi yang dilakukan oleh pengusaha diharapkan dapat memiliki komitmen jangka panjang dan berdampak positif bagi masyarakat nelayan.

Peningkatan *mindset* mengenai sikap optimisme juga perlu diberikan kepada masyarakat nelayan. Oleh sebab itu, gagasan kebijakan yang disusun berasal dari keyakinan bahwa masyarakat Indonesia khususnya nelayan akan bergerak ke arah yang lebih baik (optimisme). Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Upaya keluar dari perangkap kemiskinan dengan merumuskan kebijakan yang melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Hal tersebut dapat berdampak pada optimalisasi dan akselerasi pengentasan kemiskinan.
2. Peningkatan penghidupan kelompok kelas menengah sehingga dapat menjadi lokomotif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat nelayan. Peningkatan kelompok kelas menengah dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan keberpihakan pada masyarakat nelayan. Selain itu, peningkatan kelompok kelas menengah

dapat menjadi konsumen bagi nelayan kecil dan jaminan kepastian serapan pasar. Oleh sebab itu, peningkatan kelompok kelas menengah dapat berperan untuk memastikan sektor perikanan dan kelautan menerapkan konsep keberlanjutan.

3. Disparitas yang menyebabkan kemiskinan harus diselesaikan secara bersama dan keyakinan kolektif (Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat) untuk mentaskan kemiskinan.

Kualitas atmosfer yang baik dalam industri pariwisata meliputi kesetaraan, pemerataan, pekerjaan, kesehatan, kohesi sosial, pendidikan, pengetahuan, sosial infrastruktur, dukungan masyarakat lokal, dan aksesibilitas (Syahadat dan Kusworo, 2022). Kualitas atmosfer tersebut menjadi faktor yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat nelayan agar keluar dari perangkap kemiskinan. Salah satu karakteristik perangkap kemiskinan adalah masyarakat nelayan yang menggantungkan kehidupannya hanya pada satu sektor.



Gambar 2. Resort di Kawasan Wisata Bahari

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Oleh sebab itu, masyarakat nelayan memerlukan dorongan dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan memberikan opsi usaha lain untuk meningkatkan pendapatan. Opsi lain yang dapat ditawarkan adalah pengolahan hasil perikanan, pembuatan cindura mata, ojek kapal wisata, perkebunan, dan sektor lain yang berada di kawasan pesisir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa penyebab kemiskinan masyarakat nelayan adalah minimnya perhatian Pemerintah Daerah dan pengusaha/investor industri wisata

bahari dalam melibatkan masyarakat nelayan. Minimnya keterlibatan tersebut disebabkan karena rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan keberpihakan Pemerintah Daerah dan pengusaha/investor terhadap masyarakat nelayan, peningkatan *mindset* mengenai sikap optimisme, peningkatan kualitas atmosfer industri pariwisata bahari, dan memiliki opsi pekerjaan sampingan sehingga dapat mendapatkan pemasukan tambahan.

Kontribusi yang dapat diberikan pada lokasi penelitian adalah sebagai masukan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dapat berperan dalam industri pariwisata dan pelibatan masyarakat lokal dalam pusran bisnis wisata bahari.

Saran

1. Pemerintah Daerah dan pengusaha/investor diharapkan dapat bersinergi untuk meningkatkan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat nelayan.
2. Memberikan opsi pemasukan tambahan sehingga masyarakat nelayan tidak bertumpu pada satu pendapatan penghidupan.

Daftar Pustaka

- Anna, Zuzy. 2019. Pemanfaatan Model Bio-Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan.
- Anwar, Zakariya dan Wahyuni. 2019. Miskin di Laut yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan
- Badan Pusat Statistik. 2023. Profil Kemiskinan di Indonesia.
- Colaizzi, P.F. 1978. *Psychological Research as the Phenomenologist Views it*. New York: Oxford University Press.
- Chambers, Robert.1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*.Jakarta: LP3ES.
- Data Indonesia. 2023. Ada 1,27 Juta Nelayan di Indonesia pada 2022. Diakses dari website <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/ada-127-juta-nelayan-di-indonesia-pada-2022>
- Djou, Josef Alfonsius Gadi. 2013. *Pengembangan 24 Destinasi Wisata Bahari Kabupaten Ende*.
- Gautama, O. 2011. *Evaluasi Perkembangan Wisata Bahari di Pantai Sanur*.
- Humaedi, M Alie. 2012. *Kemiskinan Nelayan: Studi Kasus Penyebab Eksternal dan Upaya Revitalisasi Tradisi Pengentasannya di Kaliori, Rembang, Jawa Tengah*
- Imron, M. 2006. *Ko-Manajemen dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut: Kasus Kota Tegal*. Jakarta: LIPI Press

- Imron, Masyhuri (ed), 2002, *Pengelolaan Sumberdaya Laut secara Terpadu: Masyarakat Nelayan dan Negosiasi Kepentingan*. Jakarta, PMB-LIPI.
- Jamieson, Walter dkk. 2004. *Contribution of Tourism To Poverty Alleviation: Pro-Poor Tourism and The Challenge of Measuring Impacts*
- Juliantono, Ferry J. dan Munandar, Aris. *Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi*.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS.
- Masjhoer, Jussac M. *Pengantar Pariwisata Bahari*. Yogyakarta: Khitah Publishing
- Modul Pengantar SEPAKAT. 2020. Kementerian Bappenas. Jakarta: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pendit, S. Nyoman. 2009. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Alfabeta.
- Retno Winahyu dan Santiasih, 1993, *Pengembangan Desa Pantai*, dalam Mubyarto dkk., *Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Syahadat, Ray March dan Kusworo, Hendrie Adji 2022. *Ketidakberlanjutan dalam Konsumerisme Pariwisata: Sebuah Tinjauan Kritis*
- Tahawila, Amrin. 2019. *Studi Akar Kemiskinan Nelayan di Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Kota Palu*
- Walhi. 2022. *Jumlah Nelayan di Indonesia Terus Menurun Akibat Krisis Iklim dan Industri Ekstraktif*.
- Wahyono, Ary, 2016. *Ketahanan Sosial Nelayan: Upaya Merumuskan Indikator Kerentanan (Vulnerability) Terkait dengan Bencana Perubahan Iklim*.